



## **Komunitas Muslim di Kawasan Komunis**

**Erasiah**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

[erasiah@uinib.ac.id](mailto:erasiah@uinib.ac.id)

**Fikri Surya Pratama**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

[fikrisurya28@gmail.com](mailto:fikrisurya28@gmail.com)

**Vebri Hazari**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

[vebrihazari28@gmail.com](mailto:vebrihazari28@gmail.com)

### ***Abstract***

Southeast Asia is a region that has a diversity of religions and ethnicities that inhabit it. The long historical process that this region has gone through has had an impact on the formation of the country's character and political policies. So that every country in the Southeast Asian region has a different view in managing the plurality of their society due to different patterns of historical events, including Laos which adheres to communism. In general, a country labeled communist is synonymous with not supporting the existence of an ethnic or a religious community. This article aims to explain about the Muslim community in Laos as a minority community group. This research is a literature study using a political history approach. The political history approach is closely related to power, as a tool to see how a policy was taken by the government. The results of the study show that Laos has shown good progress in empowering religious communities, including the Muslim community. Although they had experienced discrimination at the beginning of the establishment of the communist regime, the amendments to the 1991 Lao Constitution in 2003 brought fresh air to the empowerment of the Lao Muslim community who have diverse racial backgrounds. The hard history experienced by the Muslim community as immigrants has shaped their character to be adaptive and play it safe in a communist country. The Muslim community does not experience discrimination because there is no involvement in the history of the political chaos of the Lao civil war in the past, as Protestants have experienced so that they are considered "imported" products from the United States. Limited numbers and no special state budget for religious activities have made the Lao Muslim community rack their brains to establish cooperation with foreign Muslim associations such as those from Thailand.

### **Abstract**

Asia Tenggara merupakan kawasan yang memiliki keragaman agama dan etnis yang menghuninya. Proses sejarah panjang yang dilalui kawasan ini berdampak dalam pembentukan karakter dan kebijakan politik negara. Sehingga setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki pandangan berbeda dalam mengatur pluralitas masyarakat mereka karena perbedaan corak peristiwa sejarah, termasuk Laos yang menganut komunisme. Pada umumnya, negara berlabel komunis identik dengan tidak mendukung adanya suatu etnis atau suatu komunitas beragama. Artikel ini bertujuan

menjelaskan tentang komunitas Muslim di Laos sebagai kelompok masyarakat minoritas. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan sejarah politik. Pendekatan sejarah politik sangat terkait dengan *power*, sebagai alat untuk melihat bagaimana sebuah kebijakan diambil oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laos menunjukkan progress yang baik dalam pemberdayaan umat beragama, termasuk terhadap komunitas Muslim. Walaupun sempat mengalami diskriminasi pada awal pendirian rezim komunis, amandemen Konstitusi Laos Tahun 1991 pada tahun 2003 membawa angin segar terhadap pemberdayaan komunitas Muslim Laos yang memiliki latar belakang ras yang beragam. Sejarah keras yang dialami komunitas Muslim sebagai pendatang ini, telah membentuk karakter mereka yang menjadi adaptif dan bermain aman di negara komunis. Komunitas Muslim tidak mengalami diskriminasi dikarenakan tidak adanya keterlibatan dalam sejarah kisruh politik perang saudara Laos di masa lampau, sebagaimana yang dialami Protestan hingga dianggap produk “impor” Amerika Serikat. Keterbatasan dalam jumlah dan tidak ada anggaran khusus negara untuk kegiatan beragama, membuat komunitas Muslim Laos memutar otak untuk menjalin kerjasama dengan asosiasi Muslim luar negeri seperti dari Thailand.

**Kata kunci:** Komunitas, Komunis, Muslim

## PENDAHULUAN

Asia Tenggara merupakan kawasan yang memiliki keragaman agama dan etnis yang menghuninya. Tak jarang keragaman ini juga menimbulkan problema sendiri dalam proses integrasi masing-masing negara, yang biasanya dikaitkan dengan sejarah yang telah dilalui negara-negara tersebut. Pembentukan masyarakat yang multikultural, termasuk yang dibahas dalam tulisan ini, yakni komunitas Muslim di Laos, merupakan produk dari perdagangan Asia Tenggara di masa lampau, masa penjajahan Barat di kawasan Asia Tenggara, hingga perang hegemoni politik selama era Perang Dingin. Proses sejarah yang panjang ini berdampak dalam pembentukan karakter dan kebijakan politik negara. Sehingga setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki pandangan berbeda dalam mengatur pluralitas masyarakat mereka karena perbedaan

corak peristiwa sejarah, termasuk Laos yang menganut komunis.<sup>1</sup>

Membicarakan komunitas Muslim Asia Tenggara, kawasan ini memiliki konsentrasi kepadatan komunitas Muslim yang tinggi di dunia, dimana ia merupakan mayoritas di negara seperti Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Mengkaji sejarah dan perkembangan komunitas Muslim di Asia Tenggara memiliki pengaruh penting dalam memperkaya khazanah sejarah Islam, serta sebagai solusi pemberdayaan komunitas Muslim terlebih jika mereka menjadi minoritas. Pemahaman ini tentu didapatkan melalui pemahaman akan sejarah kawasan dalam pembentukan negara dan komunitasnya.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> S. Yunanto, Adriana Elisabeth, Bilveer Singh, Chidchanok Rahimmula, Taha M. Basman, Karmarunizam Abdullah, Kusnanto Anggoro, *Gerakan Militan Islam: di Indonesia dan di Asia Tenggara*, (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), 2003).

<sup>2</sup>M. Dahlan, "Dinamika Perkembangan Islam di Asia Tenggara Perspektif Histori", *Jurnal Adabiyah*, Vol. XIII Nomor 1/2013: 113-121.

Geografis Asia Tenggara menjadikan tempat ini menjadi kawasan yang unik dalam menyaksikan sejarah perkembangan agama-agama di dunia. Jumlah Muslim Asia Tenggara sendiri mencapai kurang lebih 240 juta atau memenuhi 42% dari jumlah total penduduk Asia Tenggara, atau menyumbang sekitar 25% dari total populasi Muslim di dunia.<sup>3</sup> Masyarakat minoritas Muslim di kawasan Indochina (Kamboja, Laos dan Vietnam) adalah komunitas yang kecil, termarginalisasi, dan terkadang terlupakan jika dibandingkan dengan komunitas muslim di kawasan maritim Asia Tenggara, seperti Malaysia dan Indonesia.

Terdapat pendapat yang diutarakan Hussin Mutalib lewat bukunya "*Islam in Southeast Asia*", bahwasannya persoalan minoritas di kawasan Indochina disebabkan karena adanya persoalan ekonomi, ketimbang persoalan identitas politik yang menimbulkan perbedaan kelas dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Namun jika dilihat lebih dalam, melihat sejarah Laos yang dipenuhi perang saudara karena perbedaan politik, hingga terlibat dalam kawasan perebutan hegemoni pada masa Perang Dingin, pergolakan perang militer dan perang politik mengakibatkan konflik pada kawasan Indochina termasuk Laos, termasuk menyebabkan adanya keluar masuk pengungsi termasuk Muslim.<sup>5</sup> Perang Vietnam

dan kekejaman Rezim Pol Pot di Kamboja juga penulis lihat mempengaruhi kondisi demografis Muslim Laos dalam perkembangannya. Sehingga, perpecahan politik memiliki andil besar dalam mewarnai sejarah dan perkembangan komunitas Muslim di Indo-China.

Pada umumnya, persoalan persamaan komunis dengan atheis cukup populer pada masyarakat awam. Tidak hanya diberi label tak beragama, negara atau orang berlabel komunis identik dengan tidak mendukung adanya agama (bahkan membenci dalam tahap ekstrem). Contoh kasus ekstrem yang dilakukan oleh negara komunis terhadap umat beragama, terkhusus Islam seperti yang masih terjadi sampai sekarang yakni Muslim Uyghur di China, di mana mereka mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Namun membahas perlakuan negara komunis terhadap kelompok beragama tak bisa melihat dari satu contoh seperti China saja. Sejauh ini, masih ada beberapa negara di dunia yang mempertahankan komunisme sebagai ideologi negara, seperti Vietnam dan Laos.

Dinamika perlakuan negara komunis terhadap umat beragama, terkhusus pada Islam bisa kita lihat pada sejarah Uni Sovyet. Lewat buku karangan Vladimir Efanov yang berjudul "*Islam di Negara Komunis: Kebijakan Uni Soviet Terhadap Kaum Beragama*", bukannya pemerintah melarang atau menekan eksistensi kaum beragama, Uni Sovyet justru memberi kebebasan untuk memeluk agama yang

<sup>3</sup>Dardiri, Helmiati, dkk., *Sejarah Islam Asia Tenggara*, (Pekanbaru: ISAIS dan Alaf Baru, 2006), h. 53.

<sup>4</sup>Hussin Mutalib, *Islam in Southeast Asia*, (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2008).

<sup>5</sup>Robert Cooper, *Cultureshock! Laos*, (Singapore: Marshall Cavendish International (Asia) Private Limited, 2008).

dipercayai kepada rakyatnya. Hal ini berawal dahulu saat Revolusi Oktober 1917, pemerintah Uni Soviet mengeluarkan kebijakan tertib beragama yang diterapkan rezim Tsar, dimana agama dikontrol untuk kepentingan penguasa, dan agama resmi negara saat itu adalah Gereja Ortodok. Agama lain termasuk Islam diberi ruang gerak dan hak yang sangat terbatas. Namun hal ini berubah saat terjadi revolusi 15 November 1917 dengan dikeluarkannya “Deklarasi Hak-Hak Rakyat Russia”, regulasi tentang kebebasan beragama bagi seluruh rakyat Uni Soviet.<sup>6</sup> Tulisan karya Efanov ini hanya sebagai pengantar untuk membantu memahami dinamika kebijakan politik negara komunis dalam pemberdayaan multikultural, terutama terkait persoalan kepelucukan agama Islam.

Pada negara Laos, persentase Muslim sangatlah kecil dibandingkan kawasan Indochina lainnya; sebanyak 4% di Kamboja, dan 1% di Laos dan Vietnam.<sup>7</sup> Walau muslim Laos tidak terintegrasi seperti masyarakat muslim di kawasan maritim, beberapa hasil temuan menunjukkan sudah adanya institusi muslim seperti masjid, madrasah dan organisasi muslim yang ada di Laos. Melihat jumlahnya yang sangat minoritas, tentu akan menarik untuk mengkaji bagaimana kondisi minoritas Muslim Laos yang hidup di bawah payung komunisme negara ini. Pada umumnya minoritas

digambarkan sebagai kelompok yang banyak dituntut untuk merombak akar identitas mereka untuk menyesuaikan diri dalam proses integrasi negara. Sehingga sebagaimana dijelaskan Kettani, proses adaptasi minoritas Muslim dijalankan dengan dua cara, yakni akomodasi dan asimilasi. Asimilasi kerap menjadi pilihan populer yang dipraktikkan pemerintah dengan konsentrasi muslim yang kecil dalam menjalankan kebijakan integrasi nasional.<sup>8</sup>

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah, dimana dalam metode penelitian sejarah terdiri dari empat langkah kerja, yakni: 1) Heuristik atau pengumpulan sumber; 2) Kritik Sumber; 3) Analisis; 4) Historiografi atau penulisan hasil penelitian sejarah.<sup>9</sup> Metode pengumpulan sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka (*Librray research*). Sumber penelitian ini adalah karya-karya tulis yang terkait dengan tema penelitian. Proses kritik sumber juga dilakukan seiring proses pengumpulan sumber dan proses analisis sumber data penelitian atau proses penyeleksian sumber secara interaktif. Data yang diperoleh kemudian dibandingkan secara interaktif, direduksi dari segi kekuatan lalu diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

<sup>6</sup>Vladimir Efanov, *ISLAM DI NEGARA KOMUNIS, Kebijakan Uni Soviet Terhadap Kaum Beragama*, (Yogyakarta: Tanah Merah Press, 2018).

<sup>7</sup>Jane Hinchey, *Laos: Discover The Country, Culture and People*, (Belrose: Redback Publishing, 2019).  
*Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*

<sup>8</sup>M. Ali Kettani, *Minoritas Muslim di dunia Dewasa Ini*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), h. 193.

<sup>9</sup>Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

Melihat persoalan tersebut, dalam proses analisa sumber data penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah politik. Hal ini dikarenakan, sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya, bukan hanya ekonomi, tetapi politik memegang peranan penting atas kejadian sejarah umat manusia. Perbedaan perlakuan terhadap Muslim yang ditunjukkan China, Kamboja dan Uni Sovyet merupakan bukti nyata perbedaan pandangan politik atas suatu kelompok, walaupun mereka menganut ideologi yang sama yakni komunisme. Pendekatan sejarah politik sangat terkait dengan *power*, adalah sebagai alat untuk melihat bagaimana sebuah kebijakan diambil oleh pemerintah. Menurut Kuntowijoyo, ada beberapa aspek yang dianggap sebagai penggerak sejarah, diantaranya: ekonomi, agama, institusi/politik, teknologi, ideologi, militer, individu, gender/seks, umur, golongan, etnis dan ras, mitos, serta budaya.<sup>10</sup> Lewat kajian sejarah, kita bisa mengetahui sebab akibat suatu peristiwa akan suatu masyarakat, serta bisa mengambil pelajaran untuk peningkatan dalam pembinaan komunitas muslim itu sendiri.

### **Proses Pembentukan Komunitas Muslim di Laos**

Terdapat banyak pendapat mengenai gelombang masuknya Islam ke Laos. Perbedaan teori ini didasarkan pada kondisi geopolitik dan kondisi sosial-politik kawasan

Indochina pada masa penjajahan Barat di Asia Tenggara dan selama masa Perang Dingin. Membahas masuknya Islam ke Laos selalu berhubungan dengan proses masuknya Islam ke kawasan Indochina (Vietnam, Laos, Kamboja). Ditekankan oleh Saifullah, proses masuk dan perkembangan Islam di kawasan Indochina sangat dipengaruhi oleh kejayaan Kerajaan Champa yang menguasai Delta Sungai Mekong. Berdasarkan literatur Cina, Kerajaan Campa muncul sekitar abad ke-7 M dengan membawa agama Budha Mahayana. Konflik dengan Nam Tien dari Daratan Tengah Vietnam, serta serbuan kerajaan Vietnam ke Ibukota Kerajaan Cham yakni Vijaya pada 1471, membuat Kerajaan Cham mengkonsentrasikan politik kerajaan mereka di delta Sungai Mekong. Konsentrasi politik Kerajaan Cham di kawasan lain ternyata membuka pintu lain perdagangan kerajaan, yang berimbas pada interaksi dengan pedagang Muslim, dan Kerajaan Cham menjalin kongsi dagang dengan kerajaan-kerajaan di kepulauan Selatan. Diperkirakan dengan perdagangan intensi di kawasan Mekong membuat pedagang Muslim yang merangkap menjadi mubaligh dapat mengembangkan Islam di kawasan ini pada abad ke-15 M. Banyak pedagang Cham yang masuk Islam karena berinteraksi dengan pedagang Muslim dari Arab, Gujarat dan

<sup>10</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1995).

Persia<sup>11</sup>, bahkan dikabarkan Raja Champa yakni Po Klau Halu (1579-1603) telah memeluk Islam, dan pernah mengirimkan tentaranya untuk membantu pasukan Kesultanan Johor melawan invansi Portugis di Malaka pada tahun 1511.<sup>12</sup>

Gelombang Muslim juga datang pada abad ke 17-18 M. Berdasarkan tulisan pedagang Belanda di tanah Indochina, yakni Gerritt van Wuysthoff, mengatakan bahwa pedagang Muslim India, Arab, Melayu, China dan Cham banyak membawa komoditi tekstil ke wilayah Viang Chan pada awal abad ke-17 M.<sup>13</sup> Selanjutnya pada abad ke-18 M, dimana datang rombongan pedagang Muslim China dari arah Utara yakni Yunan dan pedagang Muslim Tamil dari Asia Selatan yang datang dari pelabuhan. Para pedagang China dikenal masyarakat Laos sebagai Chin Haw, dimana mereka kemudian membentuk komunitas di wilayah perbukitan. Kelompok komunitas muslim Chin Haw tinggal di wilayah perbukitan sembari menyuplai bahan makanan masyarakat perkotaan.<sup>14</sup> Para Muslim Chin Haw ini telah menguasai kawasan perdagangan Kanton, Unan dan Khaso. Komunitas Muslim Chin Haw sedikit berbeda dengan komunitas

muslim lainnya yang Sunni, dimana mereka mengikuti aliran Syi'ah akibat kedekatan mereka dengan Muslim Persia.<sup>15</sup> Berbeda dengan komunitas Muslim lainnya, diketahui Muslim Chin Haw tidak mendirikan masjid sehingga keberadaan mereka sulit dilacak hingga masa perang saudara nantinya di Laos.<sup>16</sup>

Muslim Asia Selatan juga masuk ke Laos pada masa penjajahan Barat di Asia Tenggara, mereka seperti Muslim Pakhtun dari Pakistan yang masuk ke Laos pada masa Perang Dunia 1. Mereka merupakan tentara pembantu Inggris yang ditempatkan di kawasan Laos & Myanmar. Sembari menjaid angkatan militer Inggris, mereka juga menikahi wanita lokal Laos, mempunyai keturunan dan sekaligus berdakwah di sana.<sup>17</sup> Jumlah populasi muslim Laos terus bertambah hingga tahun 1960-an. Namun jumlah yang cukup besar ini perlahan menurun drastis dalam kurun waktu 1962-1975 akibat perang saudara di Laos. Penurunan drastis juga diakibatkan larinya komunitas Muslim Chin Haw yang

<sup>11</sup>Fabian Fadhly, "Pemahaman Keagamaan Islam di Asia Tenggara Abad XIII-XX", *Millah: Jurnal Studi Agama*, 18(1), Agustus 2018: 51-78.

<sup>12</sup>Saifullah, *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

<sup>13</sup>Martin Stuart-Fox, *Historical Dictionary of Laos*, (Maryland: Scarecrow Press, 2008).

<sup>14</sup>Suara Muhammadiyah Volume 92 Edisi 9-16 Tahun 2007.

*Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*

<sup>15</sup>Asep Achmad Hidayat, *Studi Kawasan Muslim Minoritas Asia Tenggara*, (Bandung: PUSTAKA RAHMAT, 2014).

<sup>16</sup>Joachim Schliesinger, *Ethnic Group of Laos: Profile of Sino-Tibetan-speaking peoples*, (Bangkok: White Lotus Press, 2003).

<sup>17</sup>Chairul Akhmad, 24 Oktober 2012, *Muslim Laos, Minoritas Tak Tertindas (1)*, diakses 6 November 2022, dari Republika: <https://republika.co.id/berita/mcecr3/muslim-laos-minoritas-yang-tak-tertindas-1>

kebanyakan pergi mengungsi karena konflik saudara tak ada henti di Laos.<sup>18</sup>

Gelombang terakhir yakni dari para pengungsi Kamboja yang menyelamatkan diri dari kekejaman rezim Khmer Merah dibawah pimpinan Pol Pot padatahun 1975-1979. Kekejaman rezim Pol Pot mengakibatkan Muslim Champa harus hidup dalam kecemasan dan dipaksa melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh ajaran Islam, seperti masyarakat Muslim yang dipaksa untuk beternak dan memakan daging babi sebagai satu-satunya suplai daging yang disediakan pemerintah. Mereka juga dilarang untuk beribadah bahkan berbicara dalam bahasa Kamboja. Para masyarakat muslim ini sebagian melarikan diri menuju Laos serta ada yang tetap bertahan dengan menyembunyikan identitas diri dan keislamannya.<sup>19</sup>

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan geliat Muslim di kawasan Indochina ini berjalan dengan baik pada masa kejayaan Kerajaan Cham, dimana pedagang muslim sangat memiliki peran penting dalam perdagangan di kawasan delta Sungai Mekong. Seiring waktu dengan invansi Kerajaan Siam, Vietnam, Khmer dan pendudukan Barat di Indochina, kekuatan

muslim melemah seiring kejatuhan Kerajaan Champa dan menjadi teraning kembali. Sehingga pasca kejatuhan Kerajaan Cham, muslim Cham hanya berfokus bagaimana cara menyelamatkan diri dari kisruh politik di kawasan Indochina, yakni dengan mengungsi ke Laos. Sehingga pada perkembangan selanjutnya, sebagai pendatang para Muslim ini tidak bisa memiliki posisi yang berdampak pada negara Laos, disamping status sebagai “pengungsi”, Laos juga dikuasai etnis asli mereka yakni Lao Lum yang mendominasi dalam hal komunitas masyarakat dan dalam aspek pemerintahan.

Saat ini, Muslim yang tinggal di wilayah bekas jajahan Prancis itu tidak sampai 800 orang. Sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke Laos sekitar abad ke-18. Muslim Tamil, selatan India, yang pertama kali membawa Islam ke Laos.

### **Laos Masa Perang Saudara**

Selama dijajahi oleh Perancis, Laos dibentuk menjadi negara boneka Prancis dengan bentuk Monarki Konstitusional pada tahun 1947 dan merdeka pada tahun 1949 dibawah Uni Perancis. Pada tahun 1953, Perancis memberikan kemerdekaan penuh pada Laos saat Laos dipimpin oleh Raja Sisavang Vong. Berakhirnya penjajahan Perancis di Laos belum membuat kondisi negara tenang, masalah lain muncul dari persoalan politik internal negara itu,

*Volume 12 No. 2, Edisi Juli-Desember 2022*

<sup>18</sup>Omar Farouk, “The Reorganization of Islam in Cambodia and Laos”, *CIAS Kyoto University Discussion Paper*, No. 3 Maret 2008: 70-85.

<sup>19</sup>Nashih Nashrullah, 5 Agustus 2020, *Islam di Laos, Nikmati Toleransi di Bawah Pemerintah Komunis*, diaskes 6 November 2022, dari <https://republika.co.id/berita/qekagn320/islam-di-laos-nikmati-toleransi-di-bawah-pemerintah-komunis>

sebagaimana yang terjadi perang saudara sebelum kawasan ini dikuasai Siam dan Perancis. Perang saudara pasca kemerdekaan Laos ini sangat dipengaruhi kondisi peta politik masa Perang Dingin. Saat Perang Dingin, Gerakan Komunis di Laos memilih beraliansi dengan Vietnam dan Uni Sovyet untuk mengambil alih kekuasaan negara. Keterlibatan aliansi dengan Vietnam ini juga dipengaruhi perpecahan politik di Vietnam, dimana era Perang Dingin juga diwarnai dengan perang saudara karena perbedaan politik di kawasan Indochina. Perpecahan perang saudara di Laos sendiri menghasilkan tiga kelompok, yakni: 1) Kelompok pro-Barat dibawah pimpinan Jenderal Phoumi Nosavan; 2) Kelompok netral dipimpin pangeran Souvana Phouma; dan 3) Kelompok Pathet Lao dibawah Souphanouvong yang beraliansi dengan Viet Minh dan menduduki Laos Utara.<sup>20</sup>

Kelompok pertama yang melibatkan Kerajaan beraliansi dengan Amerika Serikat, sedangkan kelompok ketiga yang dipimpin partai komunis Pathet Lao mendapat dukungan pihak Vietnam Utara. Pertempuran dari tahun 1964-1973 ini berhasil dimenangkan kelompok komuis dan menghasilkan genjatan senjata. Perang ini betul-betul berakhir ketika kekuatan Vietnam

juga berhasil menumpaskan rezim Pol Pot di Kamboja padatahun 1975. Pada tahun 1975 inilah menjadi titik bangkit kebangkitan komunis untuk melengserkan Raja Savang Vatthana dari bengkuk politik negara, dan merevolusi negara menjadi Republik Demokratik Rakyat Laos yang masih berdiri hingga saat ini, dengan sistem sosialis komunisme. Walaupun berembelkan demokratik, hanya ada satu partai yang diakui yakni Partai Revolusioner Rakyat Laos (LPRP). Dimana Presiden yang menjabat selama 5 tahun sebagai kepala negara dipilih oleh Presiden dan harus disetujui oleh palemen. Kebijakan pemerintahan ditentukan oleh partai melalui 9 anggota yang sangat berkuasa Politbiro dan 49 anggota Komite Pusat. Keputusan pemerintah yang penting ditentukan Dewan Menteri.<sup>21</sup> Bisa dikatakan letak demokrasi negara ini hanya terletak pada kontes pemilihan umum untuk keanggotaan Parlemen, negara ini tidak mengakui adanya kekuatan oposisi.

Melihat penjelasan mengenai perang saudara karena perbedaan ideologi politik ini, memiliki dampak besar dengan menurunnya populasi Muslim di Laos sejak perang saudara tahun 1960-an hingga menyisakan 1% populasi muslim Laos yang memilih bertahan di Laos akibat perang saudara tersebut. Kebijakan dan kisruh politik

<sup>20</sup>Rini Afriantari, "Pemilu Di Laos: Dominasi Partai Rakyat Laos (LPRP) Dalam Menentukan Politbiro Dan Komite Pusat Meski Secara Ekonomi Mulai Menerapkan Nilai-Nilai Pasar Bebas", *Jurnal Online Westphalia*, Vol.12, No.2 (Juli -Desember 2013): 406-417, h. 409.  
*Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*

<sup>21</sup>*Ibid.*

internal yang menimpa Laos dekade 1960-1990-an sebelum amandemen konstitusi Laos pada tahun 2003, juga mempengaruhi kedudukan Muslim Chin Haw yang dari segi kedekatan etnis dekat dengan Lao Lum. Walau memiliki kedekatan etnis, mereka mendapati pembungkaman untuk mengembangkan komunitas dan dakwah, serta tidak mendapatkan kewarganegaraan. Pemerintahan yang otoriter dipraktikkan kelompok Pathet Lao menyebabkan komunitas Muslim Chin Haw perlahan bermigrasi keluar Laos, serta pusat Kota Vientiane dan Luang Prabang yang dahulu banyak dijumpai komunitas muslim perlahan memudar sejak tahun 1960-an ini.<sup>22</sup>

### **Kondisi Keberagamaan Laos Pasca Berdirinya Rezim Komunis**

Laos menjadi salah satu negara yang mempertahankan komunisme (akibat pengaruh Perang Dingin) sebagai ideologi negara, walaupun dengan kejatuhan partai komunis di negara-negara bekas Uni Sovyet dan Eropa Timur. Partai Komunis Laos yang berkuasa, Partai Revolusioner Rakyat Laos (LPRP) telah mempertahankan kontrol politik yang murni sejak 1975, sehingga negara ini hanya menjalankan satu partai sehingga tidak ada demokrasi sesuai konstitusi 1991. Kuatnya dominasi satu partai mengakibatkan minimalisir perbedaan

pendapat dalam bangku pemerintahan. Pemerintah sangat mengatur ketat pers dan media di masyarakat, baik itu cetak maupun elektronik, sirkulasi koran terbatas, mengkritik negara atau adanya upaya menimbulkan mengubah kebijakan partai dan menyebarkan isu merupakan pelanggaran kriminal. Secara umum, kondisi perdamaian pasca perang saudara mulai dilakukan sejak tahun 1975, termasuk ketegangan antara pemerintah pusat dengan etnis Hmong yang dahulu beraliansi dengan Amerika Serikat, beberapa diantara mereka sudah ada yang dilaporkan kembali terlibat dalam posisi strategis pemerintahan negara Laos.<sup>23</sup> Walau demikian, tidak bisa dipungkiri serangan-serangan kecil-kecilan masih terdapat dalam negara ini, tetapi tidak mengarah pada satu arah gerakan politik.

Selama konflik 1975, konflik ini diakibatkan oleh kelompok-kelompok yang masih menyatakan kesetiaan pada Raja, serta kelompok nasionalis, serta pemberontakan Suku Meo yang tidak ingin tunduk pada rezim komunis. Sedangkan selama tahun 1976, Kota Vientiane dan desa-desa sebelah timur ibukota diserang oleh gerilyawan anti komunis, dimana diberitakan bahwa gerilyawan anti komunis Laos yang menamakan dirinya Front Patriotik Revolusioner Laos (LRPF) telah menyatakan bertanggungjawab atas serangan-serangan

---

<sup>22</sup>Farouk, "The Reorganization of Islam in Cambodia and Laos".

---

<sup>23</sup>Afriantari, "Pemilu Di Laos: Dominasi Partai Rakyat Laos (LPRP)...".

terhadap Kedutaan Besar Uni Sovyet dan Kedutaan Besar Kuba. Untuk menanggulangi serangan-serangan dari gerilyawan nasionalis, pemerintah Laos secara terus-menerus berusaha membasmi gerakan-gerakan itu.

Konflik sepanjang tahun 1975-1976 ini merangsang pemerintahan Laos untuk membuat rancangan konstitusi baru 1976. Perancangan konstitusi baru ini juga diiringi dengan indoktrinasi-indoktrinasi khusus pada para pemuda yang menganggur, para perusuh, para pejudi, dan pecandu obat bius. Indoktrinasi ini diimplementasikan pemerintah juga dalam konstitusi yang melarang praktik keagamaan Katolik yang dianggap sebagai produk Eropa yang tidak sesuai dengan kehidupan Laos. Pada 6 April 1976, pemerintah memproklamkan Buddha sebagai satu-satunya agama yang baik untuk kehidupan negara, karena dianggap telah berperang penting selama sejarah pembentukan dan membangun negara Laos.

Upaya perbaikan mulai dijalankan pada kisaran tahun 2001-2002, dimana mulai ada pembaharuan konstitusi negara yang mengupayakan adanya kebebasan beragama. Walau kembali dalam praktiknya, beberapa pembatasan masih terjadi, serta masih ada tindakan pelanggaran dan pelecehan oleh pemerintah daerah pada kebebasan keagamaan warga negara, terutama pada Kristen Protestan. Dimana sejak tahun 2002,

pemerintah pusat telah membolehkan dibukanya kembali beberapa Gereja Protestan di berbagai daerah<sup>24</sup>, namun masih terdapat tindakan pelecehan agama oleh pejabat daerah yang terus mencoba memaksa para penganut Protestan untuk melepaskan keyakinan mereka, meskipun tidak ada kasus pelepasan paksa yang dilaporkan setelah Desember 2001 oleh Committees on Foreign Relations of the U.S. Senate and International Relations of the U.S. House of Representatives.

Diskriminasi terhadap Protestan ini dilandasi anggapan Protestan sebagai produk “impor” Barat di Laos. Patut dicurigai kemungkinan tindakan diskriminasi oleh pejabat daerah ini lepas dari pengawasan pusat, kemungkinan ada oknum pemerintah pusat yang mendukung tindakan diskriminasi pada umat Protestan ini. Proses pembelajaran dan dakwah Protestan juga sulit dilakukan dengan adanya pengawasan ketat atas masuknya literatur keagamaan dari luar negeri. Tercakup pada laporan Committees on Foreign Relations of the U.S. Senate and International Relations of the U.S. House of Representatives, hingga tahun 2002 terdapat tahanan umat beragama di

---

<sup>24</sup>Pada tahun 2001 otoritas lokal menutup sekitar 20 dari 60 gereja LEC di provinsi Vientiane, terutama di Hin Distrik Hoep, Feuang, dan Vang Vieng. Selama tahun 1999 dan 2001, otoritas kabupaten dan provinsi, didukung oleh polisi, menutup sekitar 65 gereja LEC di provinsi Savannakhet dan Luang Prabang. Banyak dari gereja yang tertutup ini diizinkan untuk dibuka kembali pada tahun 2002, terutama di provinsi Vientiane.

kawasan Attapeu, Savannakhet, dan Luang Prabang, dimana proses penangkapan ini terkadang tidak beralasan<sup>25</sup> dan mendapat perlakuan yang tidak adil<sup>26</sup>. Walau sebagian besar sudah dibebaskan, namun masih ada yang beberapa ditahan sekitar 19 orang hingga penghujung 2002 yang semuanya beragama Kristen.<sup>27</sup>

Di sinilah letak keunikan komunisme Laos, komunis yang identik dengan non-agamis malah mengistimewakan suatu golongan agama dalam bernegara. Hal ini mungkin tak lepas dari identitas sejarah negara itu yang dahulu merupakan kerajaan Buddha. Anggota LPRP dan lembaga pemerintah menaruh perhatian besar pada

Buddhisme Theravada, yang dipraktikkan oleh lebih dari 60 persen populasi. Pengamatan pemerintah kontrol pendeta, dukungan pelatihan, dan pengawasan kuil dan fasilitas lainnya merupakan bentuk pilih kasih. Banyak orang menganggap agama Buddha sebagai bagian integral dari budaya nasional dan sebagai cara hidup di Laos. Sikap ini dilihat sebagai bentuk penguatan legitimasi politik negara dan identitas masyarakat Lao-Buddha dalam membendung Kristen, terutama Protestan yang merupakan mereka anggap sebagai produk Amerika Serikat.

“*Lalu bagaimana dengan Muslim yang tersisa?*”, dengan persentase hanya sekitar 1% dari total populasi Laos berdasarkan data Encyclopedia Britannica, Muslim sepertinya memiliki posisi “keuntungan” tersendiri dengan demografis yang sangat minoritas, serta tidak memiliki sejarah dalam keterlibatan “perlawanan” terhadap pemerintah Kerajaan, Republik ataupun kelompok komunis, sehingga nasibnya masih dikatakan jauh lebih baik ketimbang Kristen yang terlibat perang politik sejak era Perang Dingin yang berimbas hingga masa kontemporer ini. Islam tidak meninggalkan kesan yang “mengancam” bagi pemerintah pusat, mengingat sebagian Muslim negaraini adalah mereka yang dahulu tertindas dari negara-negara tetangga Laos, sehingga mereka seperti orang-orang yang menyelematkan diri ke Laos sebagai

<sup>25</sup> Ada beberapa laporan bahwa pihak berwenang menangkap atau menahan orang, seringkali tanpa tuduhan, karena mereka mengadakan atau menghadiri ibadah keagamaan yang tidak sah. Misalnya, pada bulan Februari 2002, seorang pendeta ditangkap di provinsi Vientiane karena melakukan kebaktian tanpa izin; pendeta dibebaskan setelah 1 bulan penahanan setelah intervensi LFNC. Pada Januari 2002, seorang anggota senior gereja ditahan sebentar di provinsi Vientiane setelah berbicara dengan pengunjung asing. Pada bulan Maret 2002, pihak berwenang di Savannakhet menangkap dan menahan dua pendeta gereja LEC yang sedang memimpin sebuah pemakaman. Keduanya dibebaskan setelah beberapa minggu ditahan, menyusul intervensi LFNC. Pada tanggal 9 Juni 2002, pejabat di desa Somsaad, distrik Champhone, menahan 20 orang Kristen gereja LEC yang sedang menghadiri kebaktian Minggu pagi di Provinsi Savannakhet. Mereka yang ditahan dituduh mengadakan pertemuan tanpa izin dan dibawa ke kantor distrik; semua 20 dibebaskan setelah penahanan beberapa minggu.

<sup>26</sup> Ada beberapa laporan bahwa tahanan agama dipilih untuk perlakuan buruk selama dalam kurungan. Kondisi di penjara sangat keras, dan tahanan agama menderita akibat jatah makanan yang tidak memadai, kurangnya perawatan medis, dan tempat tinggal yang sempit.

<sup>27</sup> Committee on Foreign Relations of The U.S. Senate and International Relations of The U.S. House of Representatives Respectively, *Annual Report on International Religious Freedom 2002*, (Department of State, November 2002), h. 248.

pengungsi. Jumlah kecil dan tahu akan status kedatangan diri mereka, membuat komunitas Muslim memilih jalan aman.

### **Perkembangan Kebebasan Beragama di Laos**

Kondisi kehidupan beragama di Laos mulai menunjukkan progress baik dengan diadakannya amandemen Konstitusi Laos 1991 pada tahun 2003. Konstitusi dirubah menjadi negara menjamin kebebasan warganya untuk memeluk agama-agama, walaupun dalam pelaksanaanya masih diawasi ketat oleh pemerintah pusat dan daerah.<sup>28</sup>Konstitusi Laos memberi warga negara “hak dan kebebasan untuk percaya

atau tidak percaya pada agama.” Keputusan No. 315 pada tahun 2016 dengan maksud untuk memperjelas aturan untuk praktik keagamaan, mendefinisikan pemerintah sebagai penengah terakhir dari kegiatan keagamaan yang diizinkan. Namun dalam praktiknya, masih terdapat praktik pembatasan kegiatan keagamaan di Laos, baik di perkotaan maupun pedesaan, terutama pada Protestan<sup>29</sup>. Pembatasan-pembatasan ini sendiri memberikan dampak pada sebgai pola pikir politis masyarakat Laos. Anggota agama minoritas terus menyembunyikan afiliasi agama mereka untuk bergabung dengan Partai Revolusi Rakyat Laos yang berkuasa, pemerintah, dan militer dan untuk menghindari diskriminasi di lembaga-lembaga ini. Otoritas pusat mengatakan mereka terus melakukan perjalanan ke daerah provinsi untuk melatih para pejabat untuk menerapkan Keputusan

<sup>28</sup>Menurut konstitusi 1991, Laos didefinisikan sebagai negara multi-etnis, dengan menyatakan diri memberikan "kesetaraan di antara semua kelompok etnis", dalam Pasal 8 UUD Laos menjelaskan bahwa negara mempromosikan persatuan dan kesetaraan di antara semua kelompok etnis. Semua kelompok etnis memiliki hak untuk melindungi, melestarikan dan mempromosikan adat istiadat dan budaya yang baik dari suku dan bangsa mereka sendiri. Negara melarang tindakan yang menimbulkan perpecahan dan diskriminasi, dan negara akan terus mengembangkan kebijakan yang diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan tingkat ekonomi dan sosial semua kelompok etnis. Laos juga memberikan seluruh etnisnya untuk mendapatkan hak untuk bekerja (Pasal 26) dan kebebasan berkumpul dan berserikat (Pasal 31). Melanjutkan konstitusi 1991 ini, pada tahun 1992 lewat Resolusi Organisasi Pusat Partai Mengenai Urusan Etnis Minoritas di Era Baru, pemerintah berfokus pada peningkatan kehidupan etnis minoritas secara bertahap sambil mempromosikan identitas etnis dan warisan budaya mereka, dengan langkah kebijakan mereka yaitu: 1) Membangun sentimen kebangsaan (national identity); 2) Mencapai kesetaraan antara etnis minoritas; 3) Meningkatkan tingkat solidaritas di antara etnis minoritas sebagai anggota keluarga besar Laos; 4) Menyelesaikan masalah pemikiran yang tidak fleksibel dan penuh dendam, serta ketidaksetaraan ekonomi dan budaya; 5) Memperbaiki kondisi kehidupan etnis minoritas selangkah demi selangkah; dan terakhir 6) Memperluas, semaksimal mungkin, warisan dan identitas etnis yang baik dan indah dari setiap kelompok serta kapasitas mereka untuk berpartisipasi dalam urusan bangsa.

*Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*

<sup>29</sup>Kelompok minoritas Kristen sejauh ini sering mendapatkan persoalan dari pemerintahan Laos karena terus berupaya melakukan kegoatan dakwah secara ilegal dan pembangunan gereja secara ilegal yang dianggap melanggar konstitusi. Lihat United States Department of State, Office of International Religious Freedom. “Laos 2020 International Religious Freedom Report”, *International Religious Freedom Report for 2020*: 1-14. Sejalan penelusuran ini, jarang ditemukan pada portal berita yang memberitakan konflik Muslim Laos dengan pemerintahan. Hal ini bisa jadi disebabkan pengertian akan kondisi dan situasi politik yang ada di Laos. Mengingat jumlah mereka yang jauh lebih sedikit ketimbang Kristiani, Muslim Laos harus berpandai-pandai dalam menerima dan beradaptasi dengan konstitusi negara, dimana pemberian hak beragama sendiri merupakan hal yang cukup menjamin keselamatan hidup mereka.

No. 315 dan undang-undang lain yang mengatur agama.<sup>30</sup>

Dijelaskan oleh International Work Group for Indigenous Affairs, pelaksanaan kebijakan yang telah disebutkan diatas dilaksanakan oleh Front Laos untuk Konstruksi Nasional (LFNC) yang didirikan pada tahun 1979.<sup>31</sup> Pada tahun 1988, LFNC diberi tanggung jawab untuk program-program tentang urusan etnis minoritas (tanggung jawab untuk penelitian etnis minoritas berada di bawah Lembaga Penelitian Budaya di bawah Kementerian Informasi dan Kebudayaan). LFNC bertanggung jawab untuk mengawasi praktik keagamaan di Laos, menginstruksikan pejabat lokal untuk menoleransi agama minoritas, sehingga tindakan ini berkontribusi pada penurunan angka penangkapan dan pelepasan paksa pemeluk agama Kristen di beberapa daerah yang sebelumnya mengalami diskriminasi, walaupun belum signifikan dan masih banyak pejabat daerah yang “nakal” pada ummat Protestan, terutama dalam kurun waktu 2005-2009<sup>32</sup>.

Sekiranya LFNC sudah mampu menunjukkan performa yang baik seiring waktu dalam mengurus perizinan dan kehidupan ummat beragama, kecuali Protestan yang masih dipengaruhi oleh bumbu politik. Jika ummat Kristen masih mengalami dikriminasi oleh pejabat daerah, kelompok Muslim tidak bernasib sama. Seperti Muslim Cham yang bertatus sebagai pendatang, mereka mulai mendapatkan status

---

masih terdengar oleh pemerintah. Selama setahun terakhir, telah terjadi penangkapan, penahanan, pelepasan keyakinan secara paksa, dan pengusiran paksa dari desa-desa, khususnya di provinsi Luang Prabang, Xiang Khoung, Bolikhamsai, Phongsali, Oudomsai, dan Bokeo, dan pemerintah pusat tampaknya bersikap tidak mampu atau tidak mau (dikarenakan fokus pada citra kota-kota besar), sehingga persoalan daerah diberikan otoritas provinsi agar bertanggung jawab penuh atas pelanggaran atas konstitusi ini. Persoalan daerah ini sangat meresahkan mengingat pemerintah pusat yang telah serius dalam pemberdayaan di beberapa bidang lain dan kesediaan beberapa elemen pemerintah Laos untuk terlibat dalam masalah kebebasan beragama. Pada tahun 2008 hingga 2009, banyak juga penggiat dakwah Protestan yang ditangkap dan dipaksa keluar dari keyakinan mereka saat dipenjarakan di penjara provinsi, walau hal ini disangkal oleh pemerintah Laos dengan dalih mereka dipenjarakan karena sebagai pendatang ilegal dan akan dideportasi ke Vietnam. Menurut Departemen Luar Negeri Laos, dalam beberapa kasus para pendeta ditangkap ini bukan karena atas dasar agama saja, namun ada alasan lain seperti beberapa pendeta yang mencoba menyeberangi perbatasan ke Thailand tanpa izin, sementara yang lain menunjukkan bahwa mereka mungkin membawa dokumentasi tentang diskriminasi agama di Laos. Penyelesaian secara damai antara kelompok Protestan dan pejabat daerah ini biasanya ditengahi oleh LFNC. Etnis minoritas Protestan ditahan di provinsi Phongsali selama tahun 2008 dengan tujuan memaksa mereka untuk melepaskan keyakinan mereka. Pada Februari 2008, 58 orang Kristen Hmong ditangkap di provinsi Bokeo. Tak jarang juga penindasan pada kelompok Protestan ini dilakukan karena provokasi pejabat Provinsi. Pada bulan Juli, 80 orang Kristen di provinsi Saravan ditahan untuk memaksa pelepasan iman mereka setelah pembunuhan seorang Kristen lokal oleh penduduk non-Kristen. Penangkapan dan penahanan baru-baru ini paling sering terjadi di provinsi Oudomsai, Luang Namtha, dan Salavan. Pemerintah Laos membebaskan beberapa tahanan tahun lalu: pada November 2008, 8 pendeta Khmu dibebaskan, tetapi masing-masing dikenakan biaya \$350 untuk biaya penahanan.

*Volume 12 No. 2, Edisi Juli-Desember 2022*

<sup>30</sup>United States Department of State, “Laos 2020 International Religious Freedom Report”.

<sup>31</sup>*The Constitutional and Political System*, diakses 17 Oktober 2022, dari International Work Group for Indigenous Affairs: <https://web.archive.org/web/20100602213432/http://www.iwgia.org/sw17628.asp>

<sup>32</sup>Sebenarnya, pemerintahan Laos pada tahun 2005 membawa beberapa perubahan positif bagi kelompok agama di Laos, khususnya di daerah perkotaan dan bagi masyarakat mayoritas Buddha, yang mampu hidup rukun dalam keberagaman. Walau dalam beberapa tahun terakhir, di kawasan daerah (provinsi), laporan diskriminasi agama

kewarganegaraan mereka.<sup>33</sup>Namun mereka menyadari, sebagai pendatang mereka harus “jinak” dengan situasi politik negara yang ada. Selain itu, Muslim Laos yang bisa berkonsentrasi membangun peradabannya di Kota Vientiane memiliki keuntungannya sendiri dalam menjalin hubungan dengan pemerintah pusat, maupun mengembangkan kehidupan komunitas mereka.

Komposisi Muslim kontemporer memiliki latar belakang budaya dan etnis yang beragam. Kelompok terbesar adalah Chin Haw atau Muslim Cina yang populasinya menurun sangat cepat saat masa perang saudara Laos. Kelompok kedua terdiri dari Muslim Asia Selatan biasanya dari India, Pakistan atau Afghanistan. Kelompok ketiga terdiri dari Muslim Cham dan pada dasarnya merupakan pengungsi yang melarikan diri dari Kamboja selama perang saudara terutama dengan latar belakang penganiayaan pada mereka oleh rezim Pol Pot dan Khmer Merah. Kelompok keempat diwakili oleh salah satu kelompok etnis asli di Laos yang masuk Islam karena kawin campur dengan Muslim yang tentunya dengan persentase yang kecil.<sup>34</sup>

Keragaman Muslim berdasarkan etnis ini juga membuat mereka mendirikan

asosiasi Muslim berdasarkan etnis mereka, yakni Asosiasi Muslim India, Asosiasi Muslim Pakistan dan Asosiasi Muslim Cham, yang semuanya beroperasi di Kota Vientiane. Muslim Asia Selatan ini tersebar di kawasan Kota Vientiane, Luang Prabang, Pakse dan Savannakhet. Walau terpolarisasi ke dalam etnis-etnis masing-masing, hal ini tidak menutup kemungkinan interaksi sosial dan dakwah antara komunitas muslim ini dan bahkan mereka sudah membentuk Asosiasi Muslim Laos pada tahun 2012. Dijelaskan oleh Presiden Asosiasi Muslim Laos, Muhammad Rafiq alias Sofi Seng Sone, menyatakan bahwa hubungan Muslim dengan ummat agama lain, serta dengan pemerintah Laos berjalan dengan sangat baik. Penerimaan yang baik membuat Muslim Kamboja sebagai Muslim mayoritas mampu mendirikan Masjid Azhar atau Masjid Kamboja, di Distrik Chantaburi 4 kilometer dari Kota Vientiane. Masjid ini tidak hanya untuk Muslim Kamboja saja, namun juga menjadi rumah ibadat Muslim dari berbagai negara, seperti Indonesia, Malaysia dan Palestina. Masjid ini juga berfungsi sebagai media pendidikan Islam. Keberadaan masjid di kawasan Ibukota Vientiane ini tidak diprotes oleh masyarakat sekitar yang Buddha, termasuk ketika Adzan berkumandang.<sup>35</sup>

<sup>33</sup>Farouk, “The Reorganization of Islam in Cambodia and Laos”.

<sup>34</sup>Omar Farouk & Hiroyuki Yamamoto, “Islam at the Margins: The Muslims of Indochina”, *Center for Integrated Area Studies (CIAS) Discussion Paper*, University Kyoto, Japan, No.3 2008, h. 81.

*Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*

<sup>35</sup> Asep Ahmad Hidayat, Samsuddin, Dadan Rusmana, Ajid Hakim, *Studi Islam di Asia Tenggara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 131.

Di Kota Vientiane terbentuk suatu tempat bernama Desa Namphu yang menjadi wilayah persatuan ummat Muslim Laos. Di sisnilah kegiatan ibadah ummat muslim dipusatkan dan saling bahu-membahu seperti patungan dan mengumpulkan sumbangan untuk kegiatan dakwah, terutama dalam usaha-usaha pengadaan literatur-literatur yang berguna untuk pendidikan Islam di Laos. Dana sumbangan juga diberikan untuk warga muslim yang mengalami musibah, bahkan juga diberikan untuk warga Laos non-muslim yang sedang mengalami kesulitan. Inilah bentuk toleransi yang terjalin baik di negeri komunis Laos.<sup>36</sup> Mengenai persoalan kependudukan dan pernikahan, konstitusi Laos mengizinkan adanya perpindahan agama. Kebanyakan dari penduduk muslim keturunan Asia Selatan pendatang akan menikahi wanita-wanita Laos asli kemudian menjadi *muallaf*.<sup>37</sup>

Hubungan politik yang baik antara Thailand dan Laos juga berpengaruh pada dinamika kehidupan Muslim dua negara ini, asosiasi Muslim Thailand di Bangkok memiliki andil besar dalam menjalin hubungan dengan Muslim di Laos dalam hal komersial, perdagangan hingga pendidikan. Dampak positif ini secara langsung membentuk ikatan kuat antar sesama Muslim

dari berbagai etnis, baik Muslim Lao, Muslim Cham, Muslim Asia Selatan, Muslim Melayu dan Muslim lainnya dari etnis minoritas. Muslim Laos kontemporer yang bebas berinteraksi membangun komunitas ini dan berhubungan baik dengan Muslim luar, disamping memang pemerintah tidak memberikan anggaran khusus dalam persoalan pembangunan rumah ibadah dan kegiatan keagamaan<sup>38</sup>. Gebrakan yang dilakukan komunitas muslim di Laos dalam mempersiapkan pemuda Muslim dengan kualitas pendidikan agama yang baik yaitu dengan mempersiapkan dan mengirimkan siswa muslim untuk belajar di universitas Islam yang ada di Malaysia. Harapan mereka adalah terbentuknya generasi penerus yang mampu mengorganisir komunitas muslim di Laos dengan baik di masa mendatang. Walau hal ini akan terasa sulit untuk dikembangkan secara cepat, mengingat peraturan pemerintahan masih sangat ketat terhadap pengawasan kegiatan keagamaan.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Disamping tidak ada bantuan dana dalam pembangunan rumah ibadah, kegiatan pendidikan Islam di Laos juga mengalami masalah kurangnya literasi. Buku-buku bertema Islam kebanyakan terjemahan Bahasa Thailand, walau memiliki beberapa persamaan dalam segi bahasa, hal ini tentu memiliki pengaruhnya tersendiri dalam persoalan minat mempelajari agama Islam, sehingga menyulitkan kegiatan dakwah pada penduduk Laos yang non-muslim (Lihat Akhmad, 2022). Hal ini dapat kita simpulkan bahwa perkembangan keilmuan dan pengadaan tenaga pendidikan keilmuan Islam masih sangat sedikit di Laos, sehingga perlu diadakan reformasi pendidikan dari komunitas muslim Laos itu sendiri (Lihat United States Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, *Annual Report on International Religious Freedom 2002*).

<sup>39</sup>Farouk, "The Reorganization of Islam in Cambodia and Laos".

---

<sup>36</sup>Republika, 18 September 2014, *Belajar dari Gairah Minoritas Muslim Laos*, diakses 6 November 2022, dari Republika: <https://republika.co.id/berita/nc34sc3/belajar-dari-gairah-minoritas-muslim-laos>

<sup>37</sup>Stephens Mansfield, dkk., *Laos*, (New York: Cavendish Square Publishing LLC, 2017).

Secara umum, Muslim bebas melaksanakan sholat berjamaah secara terbuka di dua masjid utama mereka di Kota Vientiane, baik sholat wajib lima waktu dan sholat Jum'at. Ummat Islam juga bebas merayakan hari kebesaran agama mereka, termasuk naik Haji ke Mekkah. Kelompok yang melakukan ajaran Tabligh untuk umat beriman datang dari Thailand sekali atau dua kali setahun.<sup>40</sup> Pemerintah tetap melakukan pengawasan ketat pada aktivitas minoritas Muslim namun tidak sampai ketahap mengganggu sebagaimana yang dirasakan kelompok Protestan.

Jika membicarakan perihal ekonomi yang kerap menjadi persoalan minoritas Muslim lainnya seperti di Thailand Selatan dan Filipina Selatan, para Muslim Laos memiliki cara mereka sendiri dalam mengembangkan perekonomian mereka. Kelompok **Muslim Asia Selatan** pada umumnya memiliki profesi sebagai buruh, dan pedagang kosmetik yang diimpor dari Thailand, Vietnam dan China. Muslim Asia Selatan memiliki kelebihan dalam Bahasa Inggris untuk komunikasi dengan pembeli atau wisatawan asing yang menuju pasar-pasar di Laos. Sedangkan **Muslim Cham**, mereka bekerja sebagai penjual

ramuan obat tradisional dan tinggal di kawasan Falundus dekat kawasan Pecinan.<sup>41</sup>

Sedangkan sebagian kecil kelompok **Muslim lokal** di Vientiane, mereka bekerja pada bidang seperti pemilik restoran halal di kawasan Taj off Man Tha Hurat Road, serta dua atau tiga restoran halal lainnya berdiri di persimpangan jalan Phonxay dan Nong Bon Roads. Mereka juga ada menjadi penjual daging halal, dimana untuk membedakan kios daging mereka dengan kios daging lain yang menjual daging babi, para penjual Muslim lokal ini akan memasang simbol bulan sabit atau tanda halal dalam Bahasa Arab di depan toko mereka. Sebagian mereka juga ada yang membuka usaha katering makanan halal, serta tak jarang mereka dipercayai pemerintah Laos untuk membuat hidangan yang ditujukan sebagai jamuan kedutaan asing Muslim yang berkunjung ke Laos. Sebagian mereka juga ada yang bekerja di bidang tekstil di berbagai pasar Kota Vientiane, seperti di Talat Sao atau pasar pagi, persimpangan jalan Lan Xang, dan Khu Vieng. Muslim lokal dikenal dengan keramah-tamahannya pada pendatang asing walau mereka tidak memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik seperti Muslim Asia Selatan.

---

<sup>41</sup>Muhammad Subarkah, 8 Agustus 2020, *Jejak Komunitas Islam di Laos*, diakses 6 November 2022, dari Republika-Ihram: <https://ihram.co.id/berita/qepcy385/jejak-komunitas-islam-di-laos>

---

<sup>40</sup> Committee on Foreign Relations of The U.S. Senate, *Annual Report on International Religious Freedom 2002*. *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*

Melihat profesi yang digeluti oleh Muslim Laos, menunjukkan indikasi bahwa Muslim Laos memilih pekerjaan mereka sebagaibusinessman. Baik usaha bisnis bidang kosmetik, restoran halal, industri tekstil dan lain sebagainya. Setidaknya point ini membenarkan pendapat Hussin Mutalib pada pendahuluan, bahwa faktor ekonomi bisa menjadi salah satu akar masalah minoritas muslim Indochina. Kemandirian mereka dalam membangun usaha merupakan suatu langkah besar mereka untuk bertahan. Ditambah kondisi toleransi terhadap Muslim baik dari masyarakat mayoritas maupun pemerintah pusat dan daerah cukup baik.

## KESIMPULAN

Melihat berbagai macam tragedi politik yang mengguncang kawasan Indochina, terutama Kamboja dengan rezim komunisnya, para Muslim Cham sebagai pendatang di Laos sudah terbentuk karakter dalam diri mereka agar menjadi komunitas muslim yang inklusif dan adaptif dengan berbagai macam situasi politik yang ada, sehingga walau kini mereka kembali menetap dalam negara yang komunis, mereka mampu menyesuaikan diri tanpa dibentuk oleh pengaruh dari komunisme. Kisruh sejarah yang mewarai kehidupan komunitas Muslim ini menimbulkan rasa saling membutuhkan satu sama lain walau berbeda etnis, terutama pada masa kontemporer, Muslim Laos mampu menjalin hubungan dengan Muslim negara lain seperti Thailand dalam mengembangkan keperluan pendidikan agama dan dakwah agama Islam.

Keutungan lain mereka yang tak pernah terlibat secara politis dalam sejarah perang politik saudara Laos kurun waktu 1960-an hingga 1990-an membuat posisi mereka cukup aman ketimbang Protestan yang sudah dicap sebagai “impor” Amerika Serikat di kawasan Indochina.

Kemudian, membicarakan kelemahan komunitas Muslim Laos, tak dapat disampingkan begitu saja, persoalan jumlah mereka yang hanya terdiri dari 1% dari total penduduk Laos. Walau konstitusi menjamin kebebasan beragama, namun jumlah mereka sangat sedikit untuk mebuat gerakan yang besar, sehingga ketergantungan satu sama lain, terutama dengan bantuan pihak Muslim luar Laos cukup mempengaruhi gerakan mereka, dikarenakan pemerintah tidak mendanai pembangunan rumah ibadah dan kegiatan keagamaan. Serta pembatasan agama dalam politik, juga “memaksa” para orang beragama di Laos untuk menyembunyikan agama mereka ketika ingin terlibat dalam roda politik pemerintahan Laos yang dikuasai satu partai tunggal, yakni komunis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Afriantari, Rini. “Pemilu Di Laos: Dominasi Partai Rakyat Laos (LPRP) Dalam Menentukan Politbiro Dan Komite Pusat Meski Secara Ekonomi Mulai Menerapkan Nilai-Nilai Pasar Bebas.”

- Jurnal Online Westphalia* 12, no. 2 (Juli-Desember 2013): 406-417.
- Akhmad, Chairul. *Muslim Laos, Minoritas Tak Tertindas (1)*. 24 Oktober 2012. <https://republika.co.id/berita/mcecr3/muslim-laos-minoritas-yang-tak-tertindas-1> (diakses November 6, 2022).
- Cooper, Robert. *Cultureshock! Laos*. Singapore: Marshall Cavendish International (Asia) Private Limited, 2008.
- Committee on Foreign Relations of The U.S. Senate and International Relations of The U.S. House of Representatives Respectively. *Annual Report on International Religious Freedom 2002*. Annual Report, Department of State, Washington DC: Department of State, November 2002.
- Dahlan, M. "Dinamika Perkembangan Islam di Asia Tenggara Perspektif Histori." *Jurnal Adabiyah* XIII, no. 1 (2013): 113-121.
- Dardiri & Helmiati, dkk. *Sejarah Islam Asia Tenggara*. Pekanbaru: ISAIS & Alaf Baru, 2006.
- Efanov, Vladimir. *ISLAM DI NEGARA KOMUNIS, Kebijakan Uni Soviet Terhadap Kaum Beragama*. Yogyakarta: Tanah Merah Press, 2018.
- Fadhly, Fabian. "Pemahaman Keagamaan Islam di Asia Tenggara Abad XIII-XX." *Millah: Jurnal Studi Agama* 18, no. 1 (Agustus 2018): 51-78.
- Farouk, Omar & Hiroyuki Yamamoto. "Islam at the Margins: The Muslims of Indochina." *Center for Integrated Area Studies (CIAS) Discussion Paper No. 3*. Kyoto: University Kyoto Japan, 2008.
- Farouk, Omar. "The Reorganization of Islam in Cambodia and Laos." *CIAS Kyoto University Discussion Paper 3* (Maret 2008): 70-85.
- Hidayat, Asep Achmad. *Studi Kawasan Muslim Minoritas Asia Tenggara*. Bandung: PUSTAKA RAHMAT, 2014.
- Hidayat, Asep Ahmad & Samsuddin, Dadan Rusmana, Ajid Hakim. *Studi Islam di Asia Tenggara*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Hinchey, Jane. *Laos: Discover The Country, Culture and People*. Belrose: Redback Publishing, 2019.
- International Work Group for Indigenous Affairs. *The Constitutional and Political System..* <https://web.archive.org/web/20100602213432/http://www.iwgia.org/sw17628.asp> (diakses Oktober 17, 2022).
- Kettani, M. Ali. *Minoritas Muslim di dunia Dewasa Ini*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1995.

- Mansfield, Stephens. *Laos*. New York: Cavendish Square Publishing LLC, 2017.
- Mutalib, Hussin. *Islam in Southeast Asia*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2008.
- Nashrullah, Nashih. *Islam di Laos, Nikmati Toleransi di Bawah Pemerintah Komunis*. 5 Agustus 2020. <https://republika.co.id/berita/qekagn320/islam-di-laos-nikmati-toleransi-di-bawah-pemerintah-komunis> (diakses November 6, 2022).
- Republika. *Belajar dari Gairah Minoritas Muslim Laos*. 18 September 2014. <https://republika.co.id/berita/nc34sc3/belajar-dari-gairah-minoritas-muslim-laos> (diakses November 6, 2022).
- S. Yunanto & Adriana Elisabeth, Bilveer Singh, Chidchanok Rahimmula, Taha M. Basman, Karmarunizam Abdullah, Kusnanto Anggoro. *Gerakan Militan Islam: di Indonesia dan di Asia Tenggara*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), 2003.
- Saifullah. *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Schliesinger, Joachim. *Ethnic Group of Laos: Profile of Sino-Tibetan-speaking peoples*. Bangkok: White Lotus Press, 2003.
- Stuart-Fox, Martin. *Historical Dictionary of Laos*. Maryland: Scarecrow Press, 2008.
- “Suara Muhammadiyah.” Volume 92, no. Edisi 9-16 (Tahun 2007).
- Subarkah, Muhammad. *Jejak Komunitas Islam di Laos*. 8 Agustus 2020. <https://ihram.co.id/berita/qepcye385/jejak-komunitas-islam-di-laos> (diakses November 6, 2022).
- United States Department of State. *Laos 2020 International Religious Freedom Report*. International Religious Freedom Report for 2020, Washington DC: Office of International Religious Freedom, 2020, 1-14.